

JURNAL

STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

I Gede Anantha Kusuma dan
Sri Muryantini,

Faktor Pendorong Pemulihan Hubungan Antara Amerika Serikat
Dan Arab Saudi Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump

M. Syaprin Zahidi

Diplomasi Geisha Jepang dan Dampaknya Pada Persepsi Anggota-
anggota LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kota Malang
Terhadap Jepang

Iva Rachmawati

Film sebagai Diplomasi Budaya?

Elisabeth M. Monica dan
Rosalyn Theodora

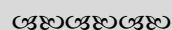
Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi/Pekerja Migran Internasional
Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018

Aditya Ramadhani dan Sri
Muryantini

Latar Belakang Keluarnya Amerika Serikat Dari Keanggotaan *Trans-
Pacific Partnership* Di Era Presiden Donald Trump

Desy Nur Aini Al Fajri

Peran *Stakeholder* Dalam *Upgrading* Industri Pariwisata Melalui
Desa Wisata (Studi Kasus: Pengembangan Desa Wisata
Kembangarum Dan Desa Wisata Kasongan



JURNAL STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

JURNAL STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan adalah terbitan berkala dua kali dalam satu tahun. Jurnal ini merupakan media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian diplomasi dan keamanan dalam lingkup studi Hubungan Internasional.

Jurnal ini ditujukan untuk menumbuhkan wacana akademik mengenai kajian diplomasi dan keamanan serta mendorong forum belajar mengajar lebih efektif.

Penanggung Jawab
Muharjono

Redaktur
Iva Rachmawati

Editor
Desy Nur Aini Al Fajri, Suryo Wibisono,
Sri Muryantini, Ariesani Hermawanto,, Iva Rachmawati

Design Grafis
Suryo Wibisono

Sekretaris
Dwi Tya Warastuti

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah hasil penelitian, kajian internasional yang bersifat ilmiah, dan kajian teoritik, terkait isu diplomasi dan keamanan studi Hubungan Internasional.

Alamat Redaksi : Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UPN "Veteran" Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk>

DAFTAR ISI

Faktor Pendorong Pemulihan Hubungan Antara Amerika Serikat Dan Arab Saudi Pada Masa Pemerintahan Presiden Donald Trump

I Gede Anantha Kusuma dan Sri Muryantini, (1-12)

Diplomasi Geisha Jepang dan Dampaknya Pada Persepsi Anggota-anggota LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kota Malang Terhadap Jepang

M. Syaprin Zahidi (13-18)

Film sebagai Diplomasi Budaya?

Iva Rachmawati (19-33)

Evaluasi Kebijakan Perlindungan PMI/Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018

Elisabeth M. Monica dan Rosalyn Theodora (34-45)

Latar Belakang Keluarnya Amerika Serikat Dari Keanggotaan *Trans-Pacific Partnership* Di Era Presiden Donald Trump

Aditya Ramadhani dan Sri Muryantini (46-61)

Peran *Stakeholder* Dalam *Upgrading* Industri Pariwisata Melalui Desa Wisata (Studi Kasus: Pengembangan Desa Wisata Kembangarum Dan Desa Wisata Kasongan

Desy Nur Aini Al Fajri (62-70)



LATAR BELAKANG KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI KEANGGOTAAN *TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP* DI ERA PRESIDEN DONALD TRUMP

Aditya Ramadhani¹ dan Sri Muryantini²

Abstrak

Kemitraan Trans Pasifik (TPP) adalah perjanjian perdagangan yang berasal dari Trans Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) yang merupakan perjanjian standar tinggi karena berupaya menghilangkan biaya pajak untuk perdagangan barang, jasa dan pertanian, serta membangun dan memperluas peraturan tentang masalah hak kekayaan intelektual, investasi asing, dan masalah terkait perdagangan lainnya. Bagi AS selama masa pemerintahan Presiden Barack Obama, TPP diproyeksikan sebagai perwujudan kebijakan "Pivot to Asia" yang dapat membentuk fondasi untuk membentuk arsitektur ekonomi dan politik kawasan Asia Pasifik, tetapi dalam perkembangannya, TPP mendapatkan banyak kendala baik dari lingkungan domestik AS dan dari lingkungan internasional. Hambatan itu memengaruhi status keanggotaan AS di TPP selama pemerintahan Presiden Donald Trump. Presiden Donald Trump mengambil kebijakan berlawanan dengan Barrack Obama dengan menarik keanggotaan AS Dari TPP pada tanggal 23 Januari 2017, yang ditandai dengan Memorandum Presiden. Makalah ini akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang penarikan AS dari keanggotaan TPP di era Presiden Donald Trump. Berdasarkan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Richard C. Snyder, penulis menemukan tiga faktor yang menjadi latar belakang kebijakan: kondisi politik domestik AS, kondisi ekonomi AS, dan konteks internasional.

Kata kunci : A.S., TPP, Kondisi Politik Domestik A.S., Kondisi Ekonomi A.S., Konteks Internasional

Abstract

Trans Pacific Partnership (TPP) is a trade agreement that originated Dari Trans Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP) which is a high standard agreement as it seeks to eliminate tax costs for trade in goods, services and agriculture, as well as to build and extend regulations about intellectual property rights issues, foreign investment, and other trade related issues. For the U.S. during the administration of President Barack Obama, TPP is projected as a manifestation of the "Pivot to Asia" policy that can form the foundation for shaping the economic and political architecture of the Asia Pacific region, but in its development, TPP gets many obstacles, Dari the domestic environment of the U.S. and Dari the international environment. That obstacles impacted the U.S. membership status in the TPP during the administration of President Donald Trump. President Donald Trump took a policy opposite to Barrack Obama by withdraws the U.S. membership Dari TPP on 23 January 2017, which marked by the Presidential Memorandum.

This paper will analyze the factors that became the background of the U.S. withdrawal Dari the membership of TPP in the era of President Donald Trump. Based on the theory of foreign policy decision making Dari Richard C. Snyder, the authors found three factors that become the background of the policy:

¹ Penulis adalah Peneliti di Laboratorium Diplomasi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta. Penulis juga menyelesaikan studi Sarjana di universitas yang sama. E-mail: gd.anantha@gmail.com

² Penulis adalah pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta. E-mail: srimuryantini03@gmail.com

the conditions of the U.S. domestic politics, the condition of the U.S. economy and the international context.

Keywords: *U.S., TPP, Conditions Of The U.S. Domestic Politics, Condition Of The U.S. Economy, International Context.*

PENDAHULUAN

Trans Pacific Partnership (TPP) adalah salah satu perjanjian perdagangan yang merupakan perjanjian standar tinggi karena berusaha untuk menghilangkan biaya pajak untuk perdagangan barang, jasa, dan pertanian, serta membangun dan memperluas peraturan yang membahas mengenai masalah hak kekayaan intelektual, investasi asing, dan isu-isu yang terkait dengan perdagangan lainnya (Li, 2012). Secara garis besar tujuan dari TPP adalah untuk menciptakan sebuah kawasan perdagangan bebas dan memperlancar jalur perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Jenis integrasi yang dilakukan melalui TPP merupakan sebuah integrasi ekonomi regional yang cukup luas dan melibatkan tiga kawasan yaitu Asia, Pasifik dan Amerika Latin. Sebelum AS menyatakan keluar dari keanggotaan TPP, perjanjian ini beranggotakan 12 negara yaitu: Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

Pada 23 Januari 2017, Donald Trump Presiden AS yang baru dilantik menandatangani *Presidential memorandum* penarikan keanggotaan AS dari TPP. Hal ini bertentangan dengan keputusan Presiden AS sebelumnya yaitu Barack Obama yang sempat mempertahankan keterlibatan AS di dalam TPP, demi menjadikan AS sebagai pengaruh besar bagi perdagangan Asia Pasifik serta membendung dominasi Cina di kawasan ini. Dari uraian tersebut maka tulisan ini akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang yang mendorong keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan TPP di era Presiden Donald Trump.

PEMBAHASAN

Sejarah Trans-Pacific Partnership (TPP)

TPP merupakan negosiasi perdagangan yang bermula dari perjanjian perdagangan khusus yang bernama TPSEP. Dalam sela-sela pertemuan

sebuah forum ekonomi antara dua puluh satu negara di kawasan Asia Pasifik yang bernama APEC pada tahun 1990-an, lima negara yaitu AS, Australia, Singapura, Chile, dan Selandia Baru mengadakan diskusi informal yang disebut "*Pacific 5*" (P5), untuk mendiskusikan kemungkinan mekanisme penciptaan perjanjian perdagangan baru antara negara-negara tersebut. Pada saat itu AS dan Australia tidak antusias dalam pembicaraan tersebut, sehingga akhirnya pembicaraan hanya dilanjutkan oleh Singapura, Chile, dan Selandia Baru yang dijuluki sebagai negara "*Pacific 3*" (P3) (Elms dan Lim, 2012).

Negara P3 terus berdiskusi mengenai kemungkinan melakukan kerjasama ekonomi tersebut. Pada pertemuan APEC tahun 2002 di Meksiko, mereka (P3) mengumumkan kepada semua negara anggota APEC mengenai niatnya untuk membuat suatu perjanjian perdagangan khusus. Setelah itu, mereka pun mulai melakukan negosiasi perdagangan. Dari tahun 2003 hingga tahun 2005, P3 sudah melakukan empat kali pertemuan. Pada negosiasi ke 5 tahun 2004, Brunei Darussalam meminta untuk bergabung dalam proses negosiasi dengan maksud ingin menjadi anggota pertama dalam perjanjian tersebut. Proses negosiasi tersebut akhirnya mencapai resolusi dan diumumkan pada pertemuan menteri perdagangan APEC tahun 2005 di Korea Selatan oleh negara P4 yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru dan Brunei Darussalam. Perjanjian TPSEP dibuat dalam 20 bab perjanjian yang didampingi dengan dua nota kesepahaman (MoU) mengenai kerjasama lingkungan dan tenaga kerja. Meskipun MoU lingkungan dan tenaga kerja diumumkan sebagai dokumen terpisah dari TPSEP, negara manapun yang keluar dari salah satu dari tiga perjanjian tersebut, secara otomatis keluar dari dua lainnya (Elms dan Lim, 2012).

Pada saat negara P4 mengumumkan mengenai TPSEP dan 2 MoU tersebut, mereka tidak

langsung meratifikasinya pada saat itu juga. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan pada 18 Juli 2005 oleh Chile, Selandia Baru dan Singapura, disusul oleh Brunei Darussalam pada 2 Agustus 2005. Sementara pemberlakukannya pada tanggal 1 Mei 2006 bagi Selandia Baru dan Singapura, tanggal 8 November 2006 bagi Chile, sedangkan Brunei menerapkan perjanjian tersebut secara parsial pada 12 Juni 2006 dan secara penuh pada 12 Juli 2009 (Brunei Darussalam Foreign Ministry and Trade, n.d).

Mengenai tujuan dibentuknya kerjasama ini, menurut pasal 1.1 perjanjian TPSEP (2005), perjanjian ini berdasarkan kepada kepentingan bersama untuk memperdalam hubungan dalam berbagai bidang, diantaranya keuangan, teknologi, pendidikan, ekonomi dan kerjasama lapangan. Tujuan TPSEP tidak terbatas kepada bidang-bidang itu saja karena juga dapat diperluas ke bidang lainnya, sehingga dengan demikian, setiap negara anggota juga berupaya mendukung proses liberalisasi APEC secara konsisten dengan melakukan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka.

Secara spesifik pasal 1.1 menjelaskan bahwa TPSEP ini bertujuan untuk: Mendorong ekspansi dan diversifikasi perdagangan di antara wilayah masing-masing.

1. Menghilangkan hambatan perdagangan dan memfasilitasi pergerakan lintas batas barang dan jasa antara wilayah.
2. Mendorong persaingan sehat di area perdagangan bebas.
3. Meningkatkan secara substansial peluang investasi antar wilayah.
4. Memberikan perlindungan yang memadai dan efektif, serta menegakkan hak kekayaan intelektual di wilayah masing-masing pihak.
5. Menciptakan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa perdagangan (Brunei Darussalam Foreign Ministry and Trade, n.d).

TPSEP adalah perjanjian perdagangan bebas pertama yang menghubungkan Asia, Pasifik, dan Amerika Latin. Brunei Darussalam dan Singapura yang berada di Asia, Selandia Baru yang berada di Pasifik, dan Chile yang berada di Amerika Latin. Selain keragaman geografis, perjanjian ini

juga mempunyai cakupan yang luas. Hal ini dikarenakan perjanjian ini meliberalisasikan hampir semua produk barang, termasuk produk kebutuhan pokok. Hingga akhirnya pada tahun 2017, P4 harus benar-benar menjadikan tarif mereka menjadi nol pada semua barang, kecuali Brunei Darussalam dalam beberapa produk (Lewis, 2011).

Selain itu perjanjian ini juga merespon permasalahan-permasalahan baru yang terkait dengan perdagangan internasional, sehingga perjanjian ini sering disebut dengan perjanjian *High Level*. Pembahasan lanjutan terkait isu-isu perdagangan akan terus diadakan misalnya, pada perjanjian TPSEP bab 20 pasal 20.1 dan 20.2 mengatakan bahwa tidak lebih dari 2 tahun setelah TPSEP diberlakukan, negara anggota harus melakukan negosiasi lanjutan terkait investasi dan layanan finansial.

Secara institusi, TPSEP membuat suatu badan yang bernama *Trans Pacific Strategic Economic Partnership Commission* sebagai badan utama yang bertanggung jawab atas administrasi perjanjian. Komisi ini dapat membuat pertemuan di tingkat menteri atau pejabat senior yang didelegasikan oleh negara anggota. Menurut Pasal 17.2, Komisi ini mengawasi kerja komite dan kelompok kerja yang dibentuk di bawah TPSEP. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa komisi bertanggung jawab atas setiap hal yang berkaitan dengan implementasi perjanjian, penelaahan kesepakatan, pertimbangan jika terdapat proposal untuk melakukan amandemen, menentukan langkah-langkah untuk melakukan ekspansi perdagangan dan investasi antara negara anggota dan mengidentifikasi area kerjasama komersial, industri dan teknis, serta mempertimbangkan segala hal yang dapat mempengaruhi operasi perjanjian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPSEP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang diprakarsai dan berlaku bagi negara P4. Perjanjian ini menggunakan kerjasama dan perdagangan bebas dalam berbagai bidang, serta beberapa regulasi sebagai instrumennya. Selain itu, penandatanganan TPSEP ini juga dibarengi dengan ratifikasi dua nota kesepahaman terkait kerjasama lingkungan dan

tenaga kerja. Walaupun TPSEP terkesan fleksibel, tetapi TPSEP mempunyai badan dan komite yang memastikan implementasi perjanjian.

Terbentuknya TPSEP dan berjalannya perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara trans pasifik ini ternyata berhasil menarik perhatian negara lain untuk bergabung. Apalagi TPSEP bersifat ekspansif secara keanggotaan, berdasarkan kepada bab 20 pasal 20.6 yang mengatur mengenai akses, menyatakan bahwa akses perjanjian ini terbuka atas persetujuan anggota, untuk negara anggota APEC ataupun negara lainnya, sehingga selain negara P4, negara – negara lain terlebih lagi negara anggota APEC berkesempatan besar untuk bisa bergabung dengan perjanjian ini.

Dinamika Hubungan Amerika Serikat Dan TPP

AS adalah negara anggota APEC pertama yang menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan TPSEP. Keinginan AS tersebut disampaikan pada September 2008 oleh pejabat *United States Trade Representative* (USTR) Susan Schwab yang berada di bawah kepemimpinan George W Bush. USTR mengumumkan bahwa AS akan berusaha untuk bergabung kembali dengan negara P4 dan ingin mengikuti negosiasi lanjutan TPSEP tentang investasi dan layanan finansial.

Analisis, pengamat, dan para pengambil keputusan umumnya percaya bahwa AS bisa menjadi katalisator bagi negara-negara Asia Pasifik untuk bergabung dengan TPSEP (Fergusson dan Bruce Vaughn, 2011). Hal itu terbukti dengan adanya beberapa negara anggota APEC lainnya yang menyatakan niatnya untuk bergabung dengan perjanjian ini. Beberapa bulan setelah bergabungnya AS, Australia dan Peru mengumumkan keinginannya untuk bergabung pada November 2008, dan Vietnam juga mendaftarkan dirinya sebagai *observer* dalam perjanjian tersebut. Akhirnya negara P4 pun berkembang dengan tambahan AS, Australia, Peru, dan Vietnam. Negara-negara tersebut merencanakan untuk memulai proses negosiasi pada Maret 2009, tetapi dikarenakan terjadi peralihan pemerintahan di AS dari Presiden George W. Bush ke Barack Obama, maka AS meminta proses negosiasi di undur (Evenett, et al., 2009).

Pada akhirnya proses negosiasi TPSEP dengan jumlah anggota yang baru dimulai pada 15-19 Maret 2010 di Australia. Proses negosiasi lanjutan TPSEP dengan jumlah negara anggota baru inilah yang dikenal dengan sebutan *Trans Pacific Partnership* (Evenett, et al., 2009). Selama proses negosiasi berjalan, TPP masih bisa menampung keanggotaan baru. Hingga tahun 2013 anggota TPP bertambah menjadi 12 negara dengan bergabungnya Malaysia pada tahun 2010, Meksiko dan Kanada pada tahun 2012 serta Jepang pada tahun 2013.

Dari Maret 2010 sampai dengan Agustus 2013 telah dilaksanakan 19 kali pertemuan formal TPP dan setelah itu dilanjutkan dengan beberapa pertemuan negosiator dan menteri dari negara anggota TPP hingga tahun 2015. Negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh 12 negara anggota TPP menghasilkan isi kesepakatan yang dirangkum dalam 30 bab. Berdasarkan website resmi USTR, 30 bab dari draft perjanjian tersebut mencakup perdagangan dan isu-isu yang terkait perdagangan lainnya dengan rincian sebagai berikut;

"Initial Provisions and General Definitions, National Treatment and Market Access for Goods, Rules of Origin and Origin Procedures, Textile and Apparel Goods, Customs Administration and Trade Facilitation, Trade Remedies, Sanitary and Phytosanitary Measures, Technical Barriers to Trade, Investment, Cross-Border Trade in Services, Financial Services, Temporary Entry for Business Persons, Telecommunications, Electronic Commerce, Government Procurement, Competition Policy, State-Owned Enterprises and Designated Monopolies, Intellectual Property, Labour, Environment, Cooperation and Capacity Building, Competitiveness and Business Facilitation, Development, Small and Medium-Sized Enterprises, Regulatory Coherence, Transparency and Anti-Corruption, Administrative and Institutional Provisions, Dispute Settlement, Exceptions and General Provisions, Final Provisions." ("TPP Final Table of Contents").

Terdapat lima fitur yang mendefinisikan TPP sebagai model kerjasama abad ke-21 ("Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement", 2015), yaitu:

Pertama, akses pasar komprehensif; TPP menghilangkan atau mengurangi hambatan tarif dan non-tarif di hampir seluruh perdagangan barang dan jasa dan mencakup spektrum penuh perdagangan, termasuk perdagangan barang, jasa dan investasi, sehingga menciptakan peluang baru dan manfaat bagi bisnis, pekerja dan konsumen.

Kedua, pendekatan regional dalam berkomitmen; TPP memfasilitasi pengembangan rantai produksi dan pasokan, perdagangan yang lancar, meningkatkan efisiensi dan mendukung tujuan negara untuk menciptakan dan mendukung pekerjaan, meningkatkan standar hidup, meningkatkan upaya konservasi, dan memfasilitasi integrasi lintas batas, serta membuka pasar domestik.

Ketiga, mengatasi tantangan perdagangan baru; TPP mempromosikan inovasi, produktivitas, dan daya saing dengan menangani isu-isu baru, termasuk pengembangan ekonomi digital, dan peran SOEs dalam perekonomian global.

Keempat, perdagangan yang inklusif; TPP mencakup unsur-unsur baru yang berusaha untuk memastikan bahwa ekonomi di semua tingkat pembangunan dan bisnis dari semua ukuran bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Termasuk komitmen untuk membantu usaha kecil dan menengah memahami perjanjian, memanfaatkan peluang serta membawa tantangan yang unik untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah TPP dan juga mencakup komitmen khusus pada pengembangan serta peningkatan kapasitas perdagangan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memenuhi komitmen dalam perjanjian dan mengambil keuntungan penuh dari manfaatnya.

Kelima, *platform* untuk integrasi regional; TPP sebagai pintu masuk untuk integrasi ekonomi regional dan dirancang untuk memasukkan ekonomi tambahan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Dalam TPP ini terdapat 30 bab yang berkaitan dengan barang dan jasa perdagangan, investasi, pengadaan pemerintah.

Secara garis besar, bergabung dengan TPP memiliki beberapa arti penting bagi AS (Planifolia, 2017), yaitu:

1. TPP sebagai alat kekuatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
2. TPP sebagai alat politik di wilayah Asia Pasifik.
3. TPP sebagai alat keamanan di Asia Pasifik.
4. TPP sebagai wadah untuk penggalangan mitra kerjasama.
5. TPP sebagai alat hukum dalam perluasan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Selama dua periode masa jabatannya, Presiden Barrack Obama merencanakan TPP sebagai pilar utama kebijakan AS di kawasan Asia Pasifik. Presiden Obama berpandangan bahwa TPP adalah satu-satunya perjanjian perdagangan yang mengandung peraturan yang komprehensif dan terkini, yang dapat menghadapi isu dan tantangan permasalahan ekonomi abad 21. Peraturan seperti *Intellectual Property Right*, lingkungan, ketenagakerjaan, investasi dan SOEs dengan menonjolkan penghapusan tarrif dan hambatan dalam perdagangan merupakan keunggulan utama TPP yang dapat membawa kesejahteraan ekonomi. TPP diharapkan dapat secara langsung membantu meningkatkan lapangan kerja serta ekonomi di AS pasca krisis dan dapat memberikan kestabilan dalam jangka panjang.

Presiden Barrack Obama juga menganggap TPP sebagai organisasi kerjasama yang dapat menyatukan negara-negara anggotanya di kawasan Asia Pasifik dalam satu *frame* geografi dengan landasan yang kuat yakni memiliki kepentingan ekonomi yang sama. TPP diproyeksikan dapat menjadi wadah regionalisme di kawasan Asia Pasifik yang dapat berkelanjutan dan mengajak negara lain di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung. Selain itu bagi AS, TPP merupakan alat untuk dapat memberikan pengaruh kekuatan di kawasan Asia Pasifik yang mulai tersaingi oleh China.

Rencana Presiden Barrack Obama seperti yang dijelaskan di atas tidak dapat terwujud, hal ini terbukti sampai akhir masa jabatannya sebagai Presiden AS, TPP tidak dapat diimplementasikan sebagai perjanjian yang berkontribusi nyata bagi kepentingan nasional AS dan berpotensi untuk di tinggalkan oleh administrasi pemerintahan yang

baru. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Faktor-faktor Yang Menjadi Latar Belakang Keluarnya AS Dari Keanggotaan TPP Di Era Presiden Donald Trump

Berdasarkan analisis dengan menggunakan pendekatan *foreign policy decision making* dari Richard C. Snyder, terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang keluarnya AS dari keanggotaan TPP di era Presiden Donald Trump. Kondisi politik dan ekonomi dalam negeri dikategorikan kedalam faktor yang bersifat internal yang meliputi; adanya protes dari masyarakat AS untuk menentang keterlibatan AS di dalam TPP, proses ratifikasi TPP di tahap Kongres yang tidak mencapai kesepakatan dan TPP berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan di AS. Sedangkan konteks internasional dikategorikan kedalam faktor yang bersifat eksternal yang meliputi; negara-negara anggota TPP menolak beberapa usulan AS di dalam perjanjian TPP dan TPP tidak membawa dampak yang signifikan bagi upaya AS dalam mencegah dominasi China di kawasan Asia Pasifik.

1. Protes Dari Masyarakat AS Untuk Menentang Keterlibatan AS Di Dalam TPP

Opini publik dan pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri merupakan suatu unsur yang penting bagi demokrasi. Opini publik mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri karena norma sebagai agenda setting, saluran pemberitaan dan pandangan publik terhadap kebijakan luar negeri yang terstruktur dan koheren. Opini publik juga merupakan unsur politik, hanya saja dipegang oleh aktor yang berbeda dan dengan cara yang berbeda pula. Opini publik ini menjadi sesuatu yang penting bagi negara demokrasi (Neack, 2008). Opini publik penting dalam memberikan efek secara tidak langsung terhadap proses pembentukan koalisi di antara para elit politik negara. Opini publik ini mampu menguatkan posisi suatu pihak dalam proses pembentukan koalisi elit. Dari sini kemudian opini publik mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri melalui koalisi elit politik yang memiliki suara terbanyak untuk mendominasi dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Seperti halnya

di AS yang mana otoritas politiknya terdesentralisasi dan memungkinkan kelompok sosial mendominasi dalam pembentukan kebijakan.

Pada tanggal 4 Februari 2016, lebih dari 35 protes diselenggarakan di kota-kota AS untuk menandai oposisi terhadap penandatanganan TPP. Para pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri sebagai koalisi *Stop Fast Track* berkumpul di luar Gedung Putih di Taman Lafayette untuk mengekspos konsekuensi dari TPP dan mendorong warga AS untuk bergabung dalam aksi mereka. Koalisi *Stop Fast Track* mengklaim TPP adalah ancaman bagi pekerjaan yang akan mengalihkan mereka ke negara-negara dengan upah lebih rendah dan mendorong perusahaan asing akan membawa bisnis mereka ke AS bersama dengan karyawan mereka serta TPP mengancam kebebasan dan privasi internet, keamanan pangan dan perawatan kesehatan ("TPP Signing Sparks Dozens Of Protests Across US Over Biggest Trade Pact", 2016).

Protes di Washington DC memicu dua hari protes di 38 kota AS lainnya. Koalisi mengklaim bahwa berdasarkan perjanjian perdagangan tersebut, 9.000 perusahaan dapat menuntut AS jika undang-undang disahkan demi kepentingan publik yang mengganggu keuntungan mereka. Di New York, pengunjuk rasa dengan kelompok yang disebut *Flush the TPP* memasang spanduk di luar gedung berita The New York Times, mengkritik kurangnya cakupan pemberitaan surat kabar pada TPP. Di Florida, unjuk rasa digelar di luar Gedung Bank of America, dan di seberang jalan dari Morgan Stanley dan Brown and Root, yang penyelenggara katakan sebagai "penasihat perusahaan" yang memiliki akses ke teks negosiasi selama tujuh tahun ("White House Protest Kicks off Nationwide Days of Action in 38 US Cities Protests Also Held In Seven Countries", 2016).

Terdapat juga kelompok - kelompok politik seperti, *Credo, Move On, Sierra Club, People Demand Action*, dan organisasi serikat buruh yang menyampaikan petisi kepada Kongres meminta anggota parlemen untuk mengatakan "*TPP No Way*". Petisi tersebut ditandatangani oleh lebih dari 1 juta orang melalui kelompok tersebut.

Melalui pengorganisasian yang intens, kreatif dan strategis dari aliansi aktivis, petani, serikat buruh, perusahaan teknologi, aktivis lingkungan, ekonom, perawat, pendukung LGBTQ, *libertarian*, pustakawan, *Tea Party* dan kelompok masyarakat sipil yang telah dilaksanakan sejak 2015 menyebabkan tidak adanya mayoritas dukungan terhadap TPP di dalam Kongres (Greer et.al., 2016).

Selain aktivisme dari berbagai kelompok, terdapat juga *survey* yang menunjukkan bahwa mayoritas warga AS tidak mendukung TPP. *Survey* tersebut dilakukan oleh Caddell & Associates pada Maret 2016. Dari hasil *survey* lembaga tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum diberikan penjelasan tentang TPP, 15 persen mengatakan bahwa mereka mendukung kesepakatan TPP dan 22 persen menentangnya dan setelah diberikan penjelasan tentang TPP, sejumlah 22 persen mendukung kesepakatan TPP, sementara 53 persen menentangnya ("Survey of US Voters Caddell & Associates March 10, 2016"). Artinya, baik sebelum maupun sesudah diberikan penjelasan mengenai TPP, jumlah warga AS yang menentang TPP selalu lebih besar dari pada jumlah warga AS yang mendukungnya.

2. Proses ratifikasi TPP di tahap Kongres yang tidak mencapai kesepakatan

Proses pengambilan keputusan kebijakan suatu negara akan melibatkan berbagai pihak dengan pengkajian mendalam karena menyangkut dari tujuan dan kepentingan negara tersebut. Seperti halnya pembahasan persetujuan TPP di lingkungan domestik AS, Presiden AS tidak dapat memutuskan secara mandiri mengenai pemberlakuan TPP, tetapi harus melalui persetujuan Kongres. TPP dapat berlaku secara resmi bagi AS apabila proses ratifikasi di dalam Kongres telah mencapai persetujuan. Kongres merupakan badan legislatif AS yang terdiri dari dua kamar, yaitu Senat dan *House of Representatives*. Selain itu ada syarat lain seperti yang terdapat di dalam bab 30, pasal 30.5, bagian 2 dari teks TPP yaitu, TPP dapat berlaku jika setidaknya enam dari dua belas anggota aslinya telah meratifikasi perjanjian tersebut dan ke enam negara tersebut mewakili 85 persen dari gabungan Produk

Domestik Bruto (PDB) dari dua belas negara anggota TPP pada tahun 2013. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka TPP yang ditandatangani pada 4 Februari 2016, baru akan berlaku 60 hari setelah tanggal 4 Februari 2018 (2 tahun lebih 60 hari dari waktu penandatanganan TPP) ("TPP Full Text", n.d).

Pada tahun 2016, Presiden Barack Obama telah membuat negosiasi dan ratifikasi TPP sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi hal ini mengalami tantangan karena pada tahun 2016 ratifikasi TPP mewakili pertarungan politik yang terjadi di tengah-tengah tahun pemilihan presiden AS. Bagi kedua partai nasional, TPP merupakan isu yang memecah belah. Anggota Partai Demokrat di Kongres tidak mendukung TPP, sebagian karena oposisi basis tradisional partai itu, yaitu serikat buruh. Ada beberapa pendapat dari tokoh Partai Demokrat yang menunjukkan penentangan terhadap TPP.

Senator Bernie Sanders pada tanggal 27 Juni 2016, mengatakan, "Partai Demokrat harus tetap pada catatan dalam oposisi untuk mengadakan pemungutan suara pada kesepakatan TPP." ("Sanders Urges Dems to Oppose Holding TPP Vote", 2016).

Senator Elizabeth Warren berpendapat bahwa, "Sebagian besar TPP adalah tentang membiarkan perusahaan multinasional membuat aturan pada segala hal mulai dari perlindungan paten hingga standar keamanan pangan, semua untuk menguntungkan diri mereka sendiri." ("Senator Warren Urges Congress to Reject TPP Agreement")

Hillary Clinton calon presiden dari Partai Demokrat mengatakan pada sebuah kampanye di Michigan pada bulan Agustus 2016, "Saya menentangnya sekarang, saya akan menentangnya setelah pemilihan, dan saya akan menentangnya sebagai presiden," ("Where Hillary Clinton Stands On Obama's Legacy Trade Deal", 2016).

Selain yang terjadi di dalam internal Partai Demokrat, dinamika internal Partai Republik telah berubah secara dramatis dan menyulitkan peluang untuk TPP dapat di ratifikasi. Partai Republik telah menjadi kurang kohesif dengan kemunculan *Tea Party* yang bertekad untuk menolak TPP. *Tea Party* adalah gerakan politik di AS yang bersekutu

dengan sayap konservatif Partai Republik ("The high stakes of TPP ratification: Implications for Asia-Pacific and beyond", 2016). Selain itu, beberapa politikus Partai Republik menunjukkan penentangan terhadap TPP.

Ted Cruz mengatakan, "Saya menentang TPP dan akan selalu menentang TPP. Kita terbunuh dalam perdagangan internasional saat ini dan kita terbunuh karena kita memiliki administrasi yang tidak menaruh perhatian terhadap pekerja AS dan pekerjaan akan pergi ke luar negeri." ("Transcript Of Republican Debate In Miami, Full Text", 2016).

Senator Rob Portman tidak akan mendukung TPP apabila merugikan pekerja AS dengan mengatakan, "Saya tidak dapat mendukung TPP dalam bentuknya saat ini. Saya akan terus mendesak pemerintahan Obama untuk mendukung pekerja AS dan mengatasi masalah ini sebelum memilih pada perjanjian TPP." ("Portman To Oppose Trade Deal As Opposition Back Home Builds", 2016).

Donald Trump, Kandidat Presiden Dari Partai Republik Menunjukkan Sikap Yang Jelas Dalam Menentang TPP. Donald Trump Keberatan Dengan TPP Di Seluruh Kampanyenya Dan Telah Bersumpah Untuk Meninggalkan TPP Jika Dia Terpilih Sebagai Presiden. Donald Trump Menyebut Kesepakatan Itu Sebagai "Pemeriksaan Berkelanjutan Terhadap Negara Kita Dan Pukulan Yang Mematikan Bagi Manufaktur Amerika." ("Where Hillary Clinton And Donald Trump Stand On Obama's Legacy Trade Deal", 2016).

Banyaknya Oposisi Dari Para Elit Politik Baik Dari Partai Demokrat Maupun Dari Partai Republik Terhadap TPP Menyebabkan Kongres Tidak Mengadakan Sesi Pengambilan Suara Pada Proses Ratifikasi TPP Selama Periode 2016-2017. Hal Ini Dikonfirmasi Lagi Setelah Proses Pemilu Di AS Telah Selesai Dan Menjadikan Donald Trump Sebagai Presiden Terpilih AS. Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell Yang Mengatakan Bahwa Setiap Keputusan Tentang TPP Atau Perjanjian Perdagangan Di Masa Depan Lainnya Akan Tergantung Pada Donald Trump, Yang Masih Memiliki Wewenang Selama Empat Tahun Lagi Untuk Bernegosiasi Dengan Prosedur *Fast Track* Di Kongres. ("McConnell Dashes Hopes For Pacific Trade Deal Vote Before Trump Takes Office", 2016).

Atas Dasar Banyaknya Oposisi Yang Menentang Keterlibatan AS Di Dalam TPP Yang menyebabkan tidak diratifikasinya perjanjian tersebut oleh Kongres pada akhir masa jabatan Barrack Obama, Donald Trump yang resmi dilantik sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017, menandatangani *Presidential memorandum* yang menarik AS dari keanggotaan TPP dan mengakhiri keterlibatan AS dalam kesepakatan perdagangan multilateral tersebut pada 23 Januari 2017.

3. TPP berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan di AS

Pada tahun 2016 tingkat pengangguran di AS adalah 4,7 persen dengan total pengangguran sejumlah 7,6 juta ("Labor Force Statistic", 2016) Jumlah pengangguran tersebut dapat meningkat apabila AS tetap terlibat di dalam TPP. Salah satu faktor yang mendorong AS keluar dari keanggotaan TPP adalah TPP diprediksi berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan di AS. Banyak pihak beranggapan bahwa TPP tidak berpihak pada kelas pekerja AS. Bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump telah mengkritik TPP, Donald Trump beranggapan bahwa TPP merupakan bencana bagi pekerja AS.

Defisit perdagangan adalah salah satu kekuatan pendorong utama dibalik hilangnya pekerjaan di AS. Tingkat ekspor dan impor berpengaruh pada ketenagakerjaan, setiap \$ 1 miliar dalam ekspor AS akan mendukung beberapa pekerjaan, disisi lain setiap \$ 1 miliar impor AS menggantikan pekerja yang akan dipekerjakan untuk membuat produk tersebut di AS ("U.S. Trade Deficit With The TPP Countries Cost 2 Million Jobs In 2015, With Job Losses In Every State", 2016). Peningkatan neraca perdagangan akan mendukung penciptaan lapangan kerja, sedangkan pertumbuhan defisit perdagangan akan menyebabkan kehilangan pekerjaan.

Pada 2015, defisit perdagangan AS dengan negara-negara TPP menyebabkan hilangnya 2 juta pekerjaan AS, lebih dari setengah (1,1 juta) di antaranya berada di sektor manufaktur ("U.S. Trade Deficit With The TPP Countries Cost 2 Million Jobs In 2015, With Job Losses In Every State", 2016).). Dalam sektor manufaktur, kerugian terbesar terjadi pada kendaraan bermotor dan

suku cadang, yang kehilangan 738.300 pekerjaan (36,4 persen dari total pekerjaan hilang), industri pakaian (181.900 pekerjaan, 9 persen), komputer dan komponen elektronik (163.900 pekerjaan, 8,1 persen), industri bahan kimia (105.400 pekerjaan yang diciptakan), mesin (66.900 pekerjaan), produk logam fabrikasi (55.700 pekerjaan), plastik dan produk karet (40.200 pekerjaan), barang cetakan dan produk terkait (21.800 pekerjaan (Scott dan Glass, 2016:7-9).

Di luar sektor manufaktur, defisit perdagangan AS dengan anggota TPP juga bertanggung jawab atas kehilangan pekerjaan yang signifikan di dalam industri pertanian (41.600 pekerjaan), penambangan (182.800 pekerjaan), utilitas (8.400 pekerjaan), perdagangan grosir (26.700 pekerjaan), perdagangan ritel (142.800 pekerjaan), transportasi dan pergudangan (17.900 pekerjaan), informasi (19.000 pekerjaan), keuangan dan asuransi (42.700 pekerjaan), real estate dan persewaan dan penyewaan (16.500 pekerjaan), layanan profesional, ilmiah, dan teknis (10.700 pekerjaan), administrasi dan dukungan dan pengelolaan limbah dan layanan remediasi (6.900 pekerjaan), layanan pendidikan (37.300 pekerjaan), layanan kesehatan dan sosial (204.200 pekerjaan), seni, hiburan, dan rekreasi (23.000 pekerjaan), akomodasi dan layanan makanan (101.800 pekerjaan); layanan lain (kecuali administrasi publik) (70.700 pekerjaan), dan administrasi publik (15.700 pekerjaan) (Scott dan Glass, 2016:10).

Pekerjaan yang hilang tersebut tersebar diseluruh wilayah AS, yaitu di dalam 50 negara bagian dan District of Columbia dengan rincian sebagai berikut, Michigan 214.600, Indiana 103.800, Kentucky 53.700, Wyoming 6.800, Alabama 46.000, Tennessee 61.000, Ohio 112.500, Oklahoma 35.300, Mississippi 22.000, Alaska 6.300, South Carolina 33.600, Arkansas 20.100, Texas 172.600 Oregon 24.900, North Carolina 60.700, Missouri 39.200, Wisconsin 39.600, California 227.500, New Mexico 11.600, Illinois 78800, Iowa 19.800, South Dakota 5.300, Louisiana 24.700, Maine 8.000, Pennsylvania 68.900, North Dakota 4.300, Colorado 28.600, West Virginia 8.400, New York 97.300, New Hampshire 7.400, Minnesota 29.000, Nebraska 10.000, Idaho 7.100, Utah 13.000, Georgia 43.100, Montana 4.900, Kansas 13.500,

Massachusetts 29.900, New Jersey 37.700, Vermont 2.900, Virginia 33.100, Florida 68.200, Hawaii 5.100, Arizona 21.000, Nevada 9.100, Maryland 20.100, Rhode Island 3.400, Connecticut 10.400, Washington 17.800, District of Columbia 1.500, Delaware 1.800 (Scott dan Glass, 2016:11-12).

Di tahun 2015, selain menghapuskan 2 juta pekerjaan AS, defisit perdagangan AS dengan 11 anggota TPP lainnya mengurangi PDB AS hampir \$ 300 miliar (1,6 persen) (Scott dan Glass, 2016:13). Bahkan jika neraca perdagangan dengan TPP tetap stabil, seperti yang diasumsikan oleh para pendukung TPP, pertumbuhan impor produk padat karya selama satu dekade berikutnya akan menghilangkan lebih dari 400.000 pekerjaan di AS, mengurangi PDB AS dengan tambahan 1,5 persen, dan menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin meningkat di AS (Capaldo et.all., 2016:1-18). Hal ini merupakan salah satu penyebab yang mempengaruhi para pengambil kebijakan di AS tidak mendukung TPP, karena TPP dianggap tidak membawa dampak yang besar bagi ekonomi AS dan berbahaya bagi pekerja AS.

4. Negara-negara anggota TPP menolak beberapa usulan AS di dalam perjanjian TPP *Intellectual Property Rights*

Sebagai ekonomi paling inovatif di dunia, perlindungan yang kuat dan efektif serta penegakan IPR sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan AS. Hampir 40 juta pekerjaan AS secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh industri "IP-intensif". Pekerja ini membayar upah lebih tinggi kepada pekerja mereka, dan industri-industri ini mendorong sekitar 60 persen dari ekspor barang dagangan AS dan sebagian besar ekspor jasa ("Intellectual Property Rights", n.d).

Di dalam TPP, proposal AS mengenai IPR mendapat tentangan dari anggota TPP yang lain. Poin penting dalam proposal IP AS yang menjadi keberatan dari anggota TPP yang lain adalah poin mengenai paten yang berkaitan dengan industri obat-obatan khususnya tentang eksklusivitas data. Eksklusivitas data adalah mekanisme yang melengkapi perlindungan paten dengan melarang produsen generik mengandalkan data klinis pencetus untuk menunjukkan keamanan dan

kemanjuran obat generik (Reichman, n.d). AS menginginkan perlindungan eksklusivitas data untuk obat biologis dengan durasi minimal dua belas tahun, sedangkan beberapa delegasi dari negara anggota TPP yang lain tidak mau menerima proposal AS untuk memberlakukan dua belas tahun periode eksklusivitas data untuk obat biologis (Rubinson, n.d). Hal ini dikarenakan ketentuan dua belas tahun periode eksklusivitas data untuk obat biologis memiliki implikasi penting terhadap undang-undang eksklusivitas data Brunei, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam yang rata-rata hanya mengatur eksklusivitas data selama lima tahun (Reisman, n.d).

Teks terakhir dari TPP yang diterbitkan pada tahun 2015, hanya menyediakan minimal lima tahun (atau delapan tahun untuk obat biologi) eksklusivitas data untuk produk farmasi baru ("TPP Full Text Chapter 18, Intellectual Property, Article 18.52"). Ketentuan ini akan merugikan industri farmasi AS, yang meminta dimasukkannya periode eksklusivitas data minimal dua belas tahun untuk obat-obatan biologis seperti yang ada di dalam hukum AS. Hal ini didukung oleh fakta bahwa industri obat-obatan AS adalah yang terbesar diantara negara anggota TPP yang lain. Menurut Komite Keuangan Senat dari sekitar 5.600 obat sedang dikembangkan di 12 negara TPP, sejumlah 3.372 berada di AS, termasuk lebih dari 900 obat biologis, yang tumbuh dari sel hidup (Weisman, ND). Industri ini menyumbang hampir \$ 800 miliar kepada ekonomi AS setiap tahunnya (Weisman, ND). Angka-angka ini menunjukkan bahwa inovasi farmasi, termasuk inovasi biofarmasi, sebagian besar terfokus di AS. Inilah yang menyebabkan AS memberikan perlindungan yang kuat dan efektif untuk IP industri obat-obatan.

State-Owned Enterprises (SOEs)

Bab 17 teks TPP mendefinisikan SOEs sebagai perusahaan yang terlibat dalam kegiatan komersial dan di mana para Pihak (Negara) (a) memiliki 50% atau lebih dari saham mereka, (b) mengendalikan 50% atau lebih hak suara melalui kepemilikan saham atau (c) memiliki hak untuk menunjuk lebih dari setengah dari badan pengatur mereka, seperti dewan direksi ("State-Owned Enterprises (SOEs)", n.d).

Di dalam TPP, AS menginginkan mekanisme untuk mengatur berbagai perusahaan yang lebih luas termasuk yang dikendalikan secara efektif oleh pemerintah dalam hal menghilangkan semua tindakan preferensial yang diberikan kepada *SOEs* yang akan meniadakan atau mengganggu akses pasar, yang melarang dukungan keuangan kepada *SOEs*, dan memastikan perlakuan yang tidak diskriminatif antara *SOEs* dan pesaing sektor swasta mereka dalam hal barang dan investasi. Hal ini di dorong oleh fakta bahwa *SOEs* semakin bersaing dengan bisnis dan pekerja AS dalam skala global, dalam banyak kasus mendistorsi pasar global, menghalangi ekspor AS, dan meremehkan pekerja AS dengan subsidi murah dan perlakuan regulasi preferensial ("State-Owned Enterprises and Competition Policy", n.d). Keinginan AS ini mendapat keberatan dari Australia, Vietnam, Malaysia dalam poin definisi dan cakupan *SOEs*. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya pengecualian pada aturan umum yang ada di dalam Bab 17 tentang *SOEs* dari teks TPP. Pengecualian terdiri dari yang bersifat umum dan khusus. Bahkan, sekitar 70% dari seluruh halaman dikhususkan untuk pengecualian tersebut. Bab 17 tentang *SOEs* akan ditinjau kembali dalam 5 tahun setelah TPP berlaku termasuk apakah akan memperluas cakupannya atau tidak Matshushita, n.d).

5. TPP tidak membawa dampak yang signifikan bagi upaya AS dalam mencegah dominasi China di kawasan Asia Pasifik

Memasuki abad ke 21, tidak diragukan lagi bahwa pengaruh China yang semakin signifikan, baik dalam kancah politik maupun perekonomian global yang dipengaruhi oleh integrasi perekonomian China ke dalam perekonomian global. Hal ini dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi China dari tahun 1990 sampai dengan 2009. Pada tahun 1990, perekonomian China hanya mencakup 1,6% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, dan pada tahun 2009, ekonomi China merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan telah mencakup 8,6 % dari PDB dunia (Lin, 2011: 1-3).

Pada tahun 2014, ukuran perekonomian China telah mencapai setengah dari perekonomian AS. Dengan posisi ekonomi terbesar nomor dua di dunia (mulai dari tahun 2009), China diprediksi akan menggeser AS dari segi PDB nominal (dalam miliar dolar AS) pada tahun 2026 dan mampu mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar dunia hingga tahun 2050 ("The World in 2016: Who Will be Number One?", n.d). Perkembangan positif perekonomian China dari tahun ke tahun inilah yang menjadi salah satu sasaran dari dikeluarkannya kebijakan "*pivot to Asia*" pada masa pemerintahan Barrack Obama dengan TPP sebagai salah satu wujudnya. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi China di kawasan Asia Pasifik yang kemungkinan berpotensi menggeser posisi AS sebagai Negara dengan perekonomian dan *power* terbesar di dunia, tetapi dalam perkembangannya TPP tidak membawa dampak yang signifikan terhadap upaya AS dalam mencegah dominasi China di kawasan Asia Pasifik. Setidaknya terdapat dua faktor yang membuktikan hal tersebut, kedua faktor tersebut memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian China dengan meningkatkan integrasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan China. Sehingga upaya resistensi yang dilakukan oleh AS melalui TPP tidak membawa dampak yang signifikan.

RCEP merupakan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang mempunyai kemiripan model perdagangan bebas dengan TPP yang dimotori oleh AS. RCEP merupakan sebuah bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Phillipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, dan Singapura) dengan enam negara mitra ekonominya, yaitu: China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Ke-16 negara anggota RCEP mempunyai hampir dari setengah populasi dunia, dan terhitung mempunyai sekitar 30% PDB global dan pelaku dari seperempat ekspor dunia ("ASEAN RCEP", n.d).

RCEP di inisiasi oleh China yang mana kerjasama ini mengarah pada perjanjian perdagangan bebas yang berkualitas tinggi, modern, komprehensif dan saling menguntungkan, serta fleksibel. Walaupun demikian, RCEP

menawarkan perjanjian yang lebih tradisional dari pada TPP, sehingga RCEP menjadi lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang ("Indonesia diantara TPP dan RCEP", n.d).

Kerjasama RCEP ini meliputi kesepakatan dalam hal perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama operasional, kerjasama dalam pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual, kerjasama antar institusi pemerintahan, pengembangan iklim investasi yang mendukung pembangunan perekonomian negara-negara anggota, serta kerjasama lain yang saling menguntungkan. Tujuan utama dari kerjasama ekonomi RCEP adalah untuk memperluas dan mempercepat kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian pasar bebas di kawasan Asia Pasifik. Fokus utama dari kerjasama ekonomi RCEP adalah menghapus hambatan tarif dan non-tarif, baik dalam perdagangan barang maupun jasa ("Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", n.d).

Bergabungnya China dengan RCEP dapat menghindarkan China dari ancaman perjanjian TPP yang dipimpin oleh AS, karena RCEP merupakan kerjasama yang berpotensi menguntungkan bagi China. RCEP memiliki pangsa perdagangan global yang lebih besar dari TPP dengan 27,4 persen berbanding 25,9 persen, RCEP juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah untuk menunjang kebutuhan tenaga kerja dengan presentase populasi yang mencakup 47,9 persen dari total populasi global (Solis, n.d). Selain itu, dengan standar peraturan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan TPP akan mendorong mitra potensial untuk lebih mudah bergabung dengan RCEP dan meningkatkan integrasi dengan China.

Pada pertemuan APEC Oktober 2013, Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif pendirian lembaga moneter baru bagi penggerak perekonomian Asia, yaitu pendirian AIIB. AIIB adalah bank pembangunan multilateral dengan misi untuk meningkatkan hasil ekonomi dan sosial di Asia dan sekitarnya ("About Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)", n.d). Xi Jinping mengemukakan keinginan china untuk memaksimalkan potensi dari negara-negara

berkembang di Asia yang selama ini terhambat kepemilikan modal.

Pada 29 Juni 2015, Perwakilan dari 57 Calon Anggota Pendiri dari AIIB berkumpul di Beijing untuk menandatangani artikel persetujuan AIIB. 50 Calon Anggota Pendiri menandatangani artikel persetujuan, termasuk: Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Brasil, Brunei Darussalam, Kamboja, China, Mesir, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Islandia, India, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Yordania, Kazakhstan, Republik Korea, Republik Kyrgyz, Laos, Luksemburg, Maladewa, Malta, Mongolia, Myanmar, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Oman, Pakistan, Portugal, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Swiss, Tajikistan, Turki, Uni Emirat Arab, Inggris, Uzbekistan, dan Vietnam, serta tetap terbuka untuk 7 Calon Anggota Pendiri yang tersisa sampai akhir 2015 ("50 Countries Sign the Articles of Agreement for the Asian Infrastructure Investment Bank", 2015).

Pembentukan AIIB tidak terlepas dari rencana China yang akan membangun kembali jalur sutra untuk mengatasi hambatan konektivitas antar-negara. Pembanguna jalur sutra dapat meningkatkan jaringan perdagangan dan transportasi di kawasan Asia. China membagi jalur sutra ke dalam dua bagian, yaitu jalur darat (*Economic Belt*) dan jalur laut (*Maritime Road*). Pembangunan infrastruktur jalur darat mencakup jaringan jalan raya, kereta api bandara, dan infrastruktur penting lainnya yang menghubungkan China ke Asia Tengah dan Asia Selatan, Timur Tengah dan Eropa. Sedangkan infrastruktur jalur laut meliputi bangunan atau perluasan pelabuhan dan kawasan industri di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Untuk mewujudkan jalur sutra tersebut, China bersedia menginvestasikan dananya hingga 40 miliar dollar AS (Rahman, n.d). Selain dana investasi, China membentuk AIIB untuk mempercepat terwujudnya proyek infrastruktur jalur sutra tersebut dengan menyediakan dana awal AIIB sebesar 50 miliar dolar AS ("Bank Investasi Infrastruktur Asia resmi Dibuka di Beijing", n.d). Proyek infrastuktur jalur sutra akan mencakup 4,4 miliar populasi dilebih dari 20 negara, dengan jumlah agregat ekonomi

sekitar US \$20 Triliun ("China's Belt and Road: An Overview", 2017).

Jalur sutera dimulai dari China dan berakhir di negara-negara ekonomi Eropa. Jalur darat akan menghubungkan China ke arah laut Kaspia melalui Asia Tengah dan berakhir di Netherlands, sedangkan untuk jalur laut akan melalui kawasan Asia Tenggara kemudian Samudra Hindia sampai akhirnya ke Timur Tengah, Afrika Utara dan Italy. Dari uraian di atas maka, AIIB dengan kemampuannya untuk memberikan pinjaman finansial kepada negara-negara mitra akan membuat negara-negara mitra semakin terikat dengan China dan jika pembangunan proyek infrastruktur jalur sutera telah terealisasi, maka akan menempatkan China sebagai pusat perdagangan dan transportasi di kawasan Asia.

KESIMPULAN

Bagi AS di era pemerintahan Presiden Barack Obama, TPP diproyeksikan sebagai wujud dari kebijakan "*Pivot to Asia*" yang dapat menjadi landasan untuk membentuk arsitektur ekonomi dan politik di kawasan Asia Pasifik, tetapi dalam perkembangannya TPP mengalami banyak kendala, baik kendala yang berasal dari lingkungan domestik AS maupun dari lingkungan internasional. Hal ini berakibat pada status keanggotaan AS dalam TPP di era pemerintahan Presiden Donald Trump, yang mana Presiden Donald Trump mengambil kebijakan yang berlawanan dengan Barack Obama, yaitu membawa AS keluar dari keanggotaan TPP pada tanggal 23 Januari 2017, yang ditandai dengan dikeluarkannya Presidensial memorandum. Terdapat dua faktor yang menjadi latar belakang kebijakan Presiden Donald Trump tersebut.

Faktor pertama adalah faktor yang bersifat internal, terdiri dari kondisi ekonomi dan politik dalam negeri AS. Kondisi politik dalam negeri AS menggambarkan bahwa keterlibatan AS di dalam TPP mendapatkan protes dari warga negaranya sendiri dengan menggelar demonstrasi diberbagai negara bagian. Selain itu, proses ratifikasi di dalam Kongres tidak mencapai kesepakatan yang di sebabkan oleh banyaknya oposisi dari para elit

politik baik dari Partai Demokrat maupun dari Partai Republik terhadap TPP.

Sedangkan mengenai kondisi ekonomi menggambarkan bahwa keterlibatan AS di dalam TPP akan berpotensi menghilangkan pekerjaan di AS dan mengurangi PDB serta menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan di AS dalam jangka waktu satu dekade.

Faktor kedua adalah faktor yang bersifat eksternal, terdiri dari adanya penolakan dari negara-negara anggota TPP terhadap beberapa usulan dari AS di dalam TPP dan TPP tidak membawa dampak yang signifikan bagi upaya AS dalam mencegah dominasi China di kawasan Asia Pasifik. Penolakan negara-negara anggota TPP terhadap usulan AS yang pertama adalah berkaitan dengan proposal AS mengenai *Intellectual Property Rights* (IPR) dan yang kedua berkaitan dengan *State-Owned Enterprises* (SOEs). Sedangkan yang berkaitan dengan rencana strategis AS dalam mencegah dominasi China di kawasan Asia Pasifik melalui TPP tidak membawa dampak yang signifikan, karena China telah bergabung dengan RCEP dan juga mendirikan AIB sebagai pilar dalam proyek pembangunan infrastruktur Jalur Sutera. Kedua hal tersebut berpotensi memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian China.

Daftar Pustaka

- Capaldo, Jeronim, Alex Izurieta dan Jomo Kwame Sundaram. 2016 "Trading Down: Unemployment, Inequality and Other Risks of the Trans-Pacific Partnership Agreement", *Global Development And Environment Institute Working Paper*, No. 16-01, Tufts University.
- Elms, Deborah and C.L. Lim. "The Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) Negotiations: Overview and Prospects", <http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/WP2325.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018.
- Evenett, Simon J., Mia Mikic dan Ravi Ratnayake. 2009. "Trade-led Growth: A Sound Strategy for Asia", United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, New York.
- Fergusson, Ian F. dan Bruce Vaughn. 2011. "The Trans-Pacific Partnership Agreement", Congressional Research Service R40502.
- Greer, Evan Tom Morello and Evangeline Lilly. "The TPP wasn't killed by Donald Trump – our protests worked", <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/28/tpp-protests-mass-opposition-worked-trump-presidency>, diakses pada tanggal 21 April 2018.
- Lewis, Meredith K. . 2011. "The Trans-Pacific Partnership: New Paradigm of Elf in Sheep Clothing?" *Boston College International & Comparative Law Review*, Vol. 34, No. 1, 2011.
- Li, Lydia Yancan, "Trans Pacific Partnership Agreement: An Analysis of Opportunities and Challenges", <https://www.cmc.edu/.../LiY%20Fellowship%20Paper.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2018.
- Lin, Justin Yifu. 2011. "China and the global economy", *China Economic Journal*, Vol. 4, No. 1.
- Matsushita, Mitsuo. "State-Owned Enterprises in the TPP Agreement". https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-6731-0_11, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- Neack, Laura 2008. *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*, Rowman & Littlefield Publishers, Plymouth UK.
- Planifolia, Vanilla. 2017 "Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 1, April-September 2017.
- Rahman, Ashfaqur. "Understanding China's 'one belt and one road' policy", <https://www.thedailystar.net/understanding-chinas-one->

[belt-and-one-road-policy-53862](#), diakses pada tanggal 24 April 2018.

Reichman, Jerome H. "Undisclosed Clinical Trial Data Under the TRIPS Agreement and Its Progeny: A broader Perspective", [https://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/docs/Reichman Bellagio4.pdf](https://www.iprsonline.org/unctadictsd/bellagio/docs/Reichman%20Bellagio4.pdf), diakses pada tanggal 19 April 2018.

Reisman, Joseph M. Ph.D., Knobbe Martens, Sheila N. Swaroop, Scott R. Seeley, "Intellectual Property Issues Under The Trans-Pacific Partnership", <https://www.biosimilardevelopment.com/doc/intellectual-property-issues-under-the-trans-pacific-partnership-0001>, diakses pada tanggal 19 April 2018.

Rubinson, Max. "Exploring the Trans-Pacific Partnership's Complexities Through the Lens of Its Intellectual Property Rights Chapter", <http://law.emory.edu/eilr/content/volume-31/issue-3/comments/exploring-trans-pacific-complexities-lens-property-chapter.html>, diakses pada tanggal 19 April 2018.

Scott, Robert E. dan Elizabeth Glass. 2016. "Trans-Pacific Partnership, currency manipulation, trade, and jobs", Economic Policy Institute, Briefing Paper, No. 420, Washington, D.C.

Solis, Mireya. "The Trans-Pacific Partnership: The politics of openness and leadership in the Asia-Pacific", <https://www.brookings.edu/research/the-trans-pacific-partnership-the-politics-of-openness-and-leadership-in-the-asia-pacific/>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

Synder, Richard C., 1962. *Foreign Policy Decision Making : An Approach to Study of International Politic*, The Free Press of Glence, New York.

Weisman, Jonathan, "Patent Protection for Drugs Puts Pressure on U.S. in Trade Talks", <https://www.nytimes.com/2015/07/31/business/international/pacific-trade-deal-drugs->

[patent-protection.html](#), diakses pada tanggal 19 April 2018.

Website

"50 Countries Sign the Articles of Agreement for the Asian Infrastructure Investment Bank", https://www.aiib.org/en/news-events/news/2015/20150629_001.html, diakses pada tanggal 24 April 2018.

"About Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)", <https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html>, diakses pada tanggal 34 April 2018.

"ASEAN RCEP", <https://igj.or.id/asean-rcep/>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

"Bank Investasi Infrastruktur Asia Resmi Dibuka di Beijing", <https://www.voaindonesia.com/a/bank-investasi-infrastruktur-asia-resmi-dibuka-di-beijing/3149798.html>, diakses pada tanggal 24 April 2018.

"China's Belt and Road: An overview", <http://www.kwm.com/en/cn/knowledge/insights/chinas-belt-and-road-overview-20170522#view-more-people>, diakses pada tanggal 24 April 2018.

"Indonesia Diantara TPP dan RCEP", <http://www.dpd.go.id/artikel-783-indonesia-diantara-tpp-dan-rcep>, diakses pada tanggal 23 April 2018.

"Intellectual Property Rights", <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-chapter-chapter-negotiating-9>, diakses pada tanggal 19 April 2018.

"Labor Force Statistics Dati the Current Population Survey", <https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000>, diakses pada tanggal 18 April 2018.

- "McConnell dashes hopes for Pacific trade deal vote before Trump takes office", <https://www.reuters.com/article/us-usa-election-trade-mcconnell/mcconnell-dashes-hopes-for-pacific-trade-deal-vote-before-trump-takes-office-idUSKBN1343DW?il=0>, diakses pada tanggal 10 April 2018.
- "Portman to oppose trade deal as opposition back home builds", https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2016/02/04/portman-to-vote-no-on-trade-deal/?utm_term=.61080b76cfb2, diakses pada tanggal 10 April 2018.
- "Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)", http://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership, diakses pada tanggal 23 April 2018.
- "Sanders urges Dems to oppose holding TPP vote", http://thehill.com/policy/finance/trade/285055-sanders-urges-dems-to-oppose-holding-tpp-vote?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=2655, diakses pada tanggal 10 April 2018.
- "Senator Warren Urges Congress to Reject TPP Agreement", <https://www.warren.senate.gov/newsroom/press-releases/senator-warren-urges-congress-to-reject-tpp-agreement>, diakses pada tanggal 10 April 2018.
- "State-Owned Enterprises (SOEs)", <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Chapter-Summary-State-Owned-Enterprises.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- "State-Owned Enterprises and Competition Policy", <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-chapter-chapter-negotiating-7>, diakses pada tanggal 20 April 2018.
- "Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement", <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/october/summary-trans-pacific-partnership>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018.
- "Survey of US Voters Caddell & Associates March 10, 2016", <https://getliberty.org/wp-content/uploads/2016/03/Pat-Caddell-ALG-TPP-Poll-Charts-3-10-16.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2018.
- "The high stakes of TPP ratification: Implications for Asia-Pacific and beyond", <https://www.brookings.edu/articles/the-high-stakes-of-tpp-ratification-implications-for-asia-pacific-and-beyond/>, diakses pada tanggal 10 April 2018.
- "The world in 2026: Who will be number one?", <https://www.economist.com/node/5134720>, diakses pada tanggal 22 April 2018.
- "TPP Final Table of Contents", <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018.
- "TPP Full Text, Chapter 18, Intellectual Property, artikel 18.52", <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>, diakses pada tanggal 19 April 2018.
- "TPP Full Text", <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text>, diakses pada tanggal 9 April 2018.
- "TPP signing sparks dozens of protests across US over biggest trade pact", <https://www.rt.com/usa/331356-tpp-signing-protests-usa/>, diakses pada tanggal 21 April 2018.
- "Trans Pacific Strategic Economic Partnership Agreement full text",

<https://www.mfat.govt.nz/assets/FTAs-agreements-in-force/P4/Full-text-of-P4-agreement.pdf>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018.

"Transcript of Republican debate in Miami, full text", <https://edition.cnn.com/2016/03/10/politics/republican-debate-transcript-full-text/>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

"U.S. trade deficit with the TPP countries cost 2 million jobs in 2015, with job losses in every state", <https://www.epi.org/publication/trans-pacific-partnership-currency-manipulation-trade-and-jobs/#epi-toc-2>, diakses pada tanggal 18 April 2018.

"Where Hillary Clinton and Donald Trump stand on Obama's legacy trade deal", <http://www.businessinsider.sg/what-is-tpp-2016-9/?r=US&IR=T>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

"Where Hillary Clinton stands on Obama's legacy trade deal", <http://www.businessinsider.sg/hillary-clinton-policy-on-tpp-trade-deal-2016-10/?r=US&IR=T>, diakses pada tanggal 10 April 2018.

"White House Protest Kicks off Nationwide Days of Action in 38 US Cities Protests Also Held In Seven Countries", <http://www.flushthetpp.org/protest-at-white-house-kicks-off-nationwide-days-of-action/>, diakses pada tanggal 21 April 2018.

Brunei Darussalam Ministry Of Foreign Affairs And Trade, "Trans-Pacific Strategic Economic Partnership:overview", <http://www.mofat.gov.bn/SitePages/TransPacific%20Strategic%20Economic%20Partnership.aspx>, diakses pada tanggal 13 Maret 2018.